

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja manajemen dalam mengelola sumber dayanya. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses kegiatan akuntansi di perusahaan. Laporan tersebut memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pihak internal seperti komisaris, direktur, manajer dan karyawan maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor dan pemasok untuk mengambil keputusan. Meskipun demikian, terkadang perusahaan menghadapi ketidakpastian. Hal ini menyebabkan perusahaan perlu menerapkan prinsip konservatisme yang merupakan konsep kehati-hatian yang terdapat sebagai salah satu alternatif dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Basu (1997) dalam Ghozali (2007) menyatakan konservatisme adalah prinsip yang mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan untung lebih lambat, menilai aset dengan nilai yang terendah dan kewajiban dengan nilai yang tinggi. Konsekuensinya, apabila terdapat kondisi yang memiliki kemungkinan menimbulkan kerugian, biaya atau hutang, maka kerugian, biaya atau hutang tersebut harus diakui. Sebaliknya, apabila terdapat kondisi yang kemungkinan

menghasilkan laba, pendapatan, atau aset, maka laba, pendapatan atau aset tersebut tidak boleh langsung diakui, sampai kondisi tersebut betul-betul terealisasi.

Almilia (2004) menyatakan konservatisme merupakan reaksi yang berhati-hati atas ketidakpastian yang ada agar ketidakpastian dan risiko yang berkaitan dalam situasi bisnis dapat dipertimbangkan dengan cukup memadai. Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan dapat diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan.

Manajer dapat melakukan pelaporan keuangan yang optimis maupun konservatif, akan tetapi pelaporan yang optimis serta cenderung *overstate* terkadang menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan. Beberapa kasus terkait hal tersebut terjadi di luar negeri dan di Indonesia, sering kali penyajian yang *overstate* merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission* (COSO) menyebutkan bahwa lima puluh persen (50%) dari perusahaan-perusahaan di AS yang melakukan kecurangan antara tahun 1987 sampai dengan 1997 dengan cara mencatat pendapatan yang prematur atau dengan menciptakan transaksi fiktif (Arens *et al.*, 2011).

Salah satu contoh kasus kecurangan manajemen dengan penyajian yang *overstate* ialah kasus kebangkrutan Enron Corporation. Enron runtuh pada akhir tahun 2001, keruntuhan tersebut dimulai pada Oktober 2001 ketika perusahaan tersebut mengumumkan kerugian per kuartal yang mengejutkan senilai \$618 juta, terkait

dengan bisnis yang dilakukan dengan pihak istimewa yang misterius yang juga merupakan bagian internal perusahaan. Pada November 2001, perusahaan juga mengumumkan mereka telah salah menyajikan laba sebesar hampir \$600 juta sejak tahun 1997, sehingga mereka harus melakukan penyajian ulang atas laporan keuangan yang telah diaudit sejak empat tahun sebelumnya. Kejadian tersebut karena ada *overstate* laba, di mana penyajian 80% laba perusahaan berasal dari bisnis yang tidak jelas yang dikenal dengan “agen pemasok jasa dan operasi energi” dan sangat mencolok ketika salah seorang manajer investasi secara terbuka mengungkapkan bahwa tidak ada yang seorang pun yang mampu menjelaskan bagaimana sebenarnya Enron menghasilkan uang (Arens *et al.*, 2011).

Penerapan akuntansi yang konservatif dalam laporan keuangan perusahaan berkaitan dengan karakteristik dewan komisaris. Karakteristik dewan komisaris tersebut secara spesifik berkaitan dengan proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit dan frekuensi rapat dewan komisaris.

Karakteristik dewan komisaris terkait dengan proporsi komisaris independen perlu diperhatikan agar terdapat independensi dalam proses pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya komisaris yang independen, pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan lebih ketat sehingga akan cenderung mensyaratkan akuntansi yang konservatif untuk mencegah sikap oportunistik manajer. Perusahaan juga perlu memiliki komisaris independen yang memiliki keahlian di bidangnya agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan

baik. Salah satu dari dewan komisaris harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan (Wardhani, 2008).

Dari sisi ukuran dewan komisaris, hal tersebut terkait dengan jumlah anggota dewan komisaris yang akan mempengaruhi mekanisme pengawasan terhadap perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih khusus dalam mengawasi perusahaan. Spesialisasi yang lebih besar tersebut dapat menunjukkan pengawasan yang lebih efektif sehingga penerapan akuntansi yang disyaratkan dewan komisaris lebih konservatif. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar pengawasan yang dilakukan akan lebih efektif (Wardhani, 2008).

Komite audit merupakan pihak akhir yang memonitor proses pelaporan keuangan perusahaan dan mereka akan mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan berkaitan dengan prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan, termasuk didalamnya prinsip konservatisme. Krishnan dan Visuanathan (2006) membuktikan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme laporan keuangan dan latar belakang keahlian dari komite audit tersebut juga berkaitan positif terhadap konservatisme. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dechow *et al.* (1996), dan Beasley *et al.* (2000) dalam Wardhani (2008) menyatakan bahwa adanya komite audit berhubungan dengan tingkat kecurangan yang lebih rendah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara mekanisme *good corporate governance* dengan tingkat konservatisme akuntansi dilakukan oleh

Ahmed dan Duellman (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara praktik akuntansi yang konservatif dengan karakteristik dewan direksi. Secara keseluruhan penelitian ini menegaskan adanya bukti yang konsisten terhadap pendapat yang menyatakan bahwa konservatisme dalam akuntansi akan membantu perusahaan untuk mengurangi biaya agensi.

Penelitian yang menghubungkan antara tingkat konservatisme dengan mekanisme *good corporate governance* juga dilakukan oleh Wardhani (2008), yang membuktikan bahwa karakteristik yang berhubungan dengan keberadaan komite audit memiliki hubungan positif dengan tingkat konservatisme akrual, akan tetapi tidak dapat membuktikan pengaruh antara independensi komisaris dan kepemilikan manajerial terhadap tingkat konservatisme akrual.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Wardhani (2008) dalam hal pengukuran konservatisme. Perbedaannya adalah penambahan frekuensi rapat dewan komisaris menjadi variabel independen. Karena, Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen sehingga lebih konservatif (Porter dan Gendall, 1993) dalam Rahmat *et al.* (2008). Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi”**.

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan?
3. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan?
4. Apakah ukuran komite audit akan berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan?

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini agar mempunyai ruang lingkup dan arah penelitian yang jelas, batasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Variabel penelitian ini adalah proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit dan konservatisme akuntansi.

3. Data penelitian yang akan diambil adalah tahun 2010-2012 sehingga diperoleh gambaran yang cukup mengenai karakteristik dewan komisaris terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini untuk menyediakan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat konservatisme pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia.
2. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tingkat konservatisme pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia.
3. Pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia.
4. Pengaruh ukuran komite audit terhadap tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoretis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai pengaruh penerapan karakteristik dewan komisaris terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik dewan komisaris dan konservatisme akuntansi.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan.
2. Memberikan masukan kepada para investor sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi.